



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PEKALONGAN

Jl Pahlawan Km.5 Kajen

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 merupakan tahun Pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 5 (lima) tahun.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan program kerja untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencan kerja yang telah ditetapkan

Pada tahun 2025 selain mengoptimalkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan berjalan juga merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungan.

Renja Perubahan Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran, Rencana Kerja dan Pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dapat tecapainya kegiatan yang telah ditetapkan.

Renja sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun anggaran 2025 serta untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Renja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Pn Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



WISODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I
NIP : 19690208 1994 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
I.1 Latar Belakang	3
I.2 Landasan Hukum	4
I.3 Maksud dan Tujuan	8
I.4 Sistematika	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN NAKER TAHUN LALU LALU	10
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bidang Koperasi, UKM dan Naker Tahun 2024 dan Capaian Renstra	10
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Naker.	21
II.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	23
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	41
III.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM dan Naker	41
III.2 Program dan Kegiatan 2025	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	43
Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran 2025	43
BAB V PENUTUP	49

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai pengusulan program dan kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju. Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program serta indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan. Sedangkan prakiraan maju memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan agar kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan dapat dipastikan.

Rencana Kerja Perubahan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun dalam rangka membantu Bupati Pekalongan dalam mewujudkan Visi dan Misi, Visi Bupati Pekalongan Periode 2025-2029 adalah “Kabupaten Pekalongan Maju, Adil, Dan Sejahtera”, sedangkan Misi yang diemban oleh Dinkop UKM dan Naker adalah mewujudkan Misi yang ke-3 yaitu : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Umkm Yang Berdaya Saing.

Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 tahun ke depan pada awal masa Jabatan Bupati Periode 2025-2029, sasaran yang ditetapkan Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan adalah “Meningkatnya Koperasi Aktif, Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro, Meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam angkatan kerja, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan Meningkatnya tata kelola kualitas Pemerintah Daerah di Dinkop UKM dan Naker Kab. Pekalongan”.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Penyusunan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJPD 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
- r. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- s. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA pelaksanaan kegiatan Dinkop UKM dan Naker tahun 2025 dalam mencapai target kinerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 antara lain adalah:

1. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan.

I.4. SISTEMATIKA

Sistematika Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN NAKER TAHUN 2024

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker tahun 2024 dan capaian Renstra,

memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bidang Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra Dinkop UKM dan Naker berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Naker,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinkop UKM dan Naker berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinkop UKM dan Naker,

Berisikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan.

II.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD,

Berisikan uraian mengenai proses dan penjelasan mengenai membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan serta penjelasan kegiatan dan proses tersebut.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

Berisikan mengenai uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada Bupati.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

III.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinkop UKM dan Naker,

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkop UKM dan Naker yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

III.2. Program dan Kegiatan,

berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kondisi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana kegiatan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIDANG KOPERASI, UKM DAN NAKER TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM DAN NAKER.

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM dan Naker merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Naker sebagai dokumen jangka menengah SKPD.

Kualitas penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Naker akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah khususnya di bidang pelayanan masyarakat, pembinaan UKM, Pembinaan Koperasi serta BLK swasta maupun pencari kerja secara *online*, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinkop UKM dan Naker.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker tahun lalu dan pencapaian Renstra Dinkop UKM dan Naker adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinkop UKM dan Naker dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinkop UKM dan Naker serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu evaluasi Renja bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian kinerja Dinkop UKM dan Naker dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun 2024 dapat dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja. Adapun capaian rencana kerja Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Capaian keuangan pelaksanaan Renja Bidang Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 9.611.593.774
- Capaian kinerja, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran /output yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan yakni sebesar 94,45 %.

Mendapatkan anggaran APBD dan DAK Non Fisik sebesar Rp.10.176.039.817 yang bersumber dari dana APBD dan DAK Non Fisik Adapun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 9.611.593.774, Anggaran belanja langsung digunakan untuk membiayai 9 Program dengan 36 sub kegiatan.

Adapun capaian keuangan pelaksanaan program/kegiatan Bidang Koperasi, UKM dan Naker tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bidang Tenaga Kerja dan Tranmigrasi.

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

- 1) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi jumlah anggaran Rp. 1.389.849.267 realisasi capaian 98,35 %.
- 2) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja jumlah anggaran Rp. 20.000.000 realisasi capaian 99,96 %.
- 3) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Rp. 10.000.000 realisasi capaian 100,00 %.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

- 1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online jumlah anggaran Rp. 100.000.000 realisasi capaian 99,02 %.
- 2) Job Fair/Bursa Kerja jumlah anggaran Rp. 80.000.000 realisasi capaian 99,53 %.
- 3) Perlindungan PMI jumlah anggaran Rp. 6.000.000 realisasi anggaran 100,00 %.

c. Program Hubungan Industrial.

- 1) Pengesahan Perusahaan bagi Perusahaan jumlah anggaran Rp. 9.000.000,00 realisasi capaian 88,98 %
- 2) Penyelenggaraan Pendataan dan informasi Sarana Hubungan Kerja dan Jaminan Sosial tenaga Kerja serta pengupahan jumlah anggaran Rp. 8.000.000,00realaisasi capaian 96,60 %
- 3) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota. Jumlah anggaran Rp.15.593.550,00, realisasi capaian 100,00 %.
- 4) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kab/Kota, Jumlah anggaran Rp 10.500.000,00, realisasi capaian 100,00 %.

d. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp. 75.000.000 realisasi capaian 100 %.

Bidan Koperasi.

a). Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- 1) Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota jumlah anggaran Rp. 106.000.000 realisasi capaian 52,60 %.

b). Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- 1) Peningkatan Produktivitas nilai tambah, akses Pasar, Akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi dan Rekturisasi usaha jumlah anggaran Rp. 455.000.000 realisasi capaian. 99,16 %.

Bidang UKM

a). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro jumlah anggaran Rp. 305.000.000 realisasi capaian 100 %.
2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro jumlah anggaran Rp. 180.000.000 realisasi capaian 79,51 %.
3. Pemberdayaan Kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro jumlah anggaran Rp. 400.000.000 realisasi capaian 99,78 %.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro Jumlah anggaran Rp 514.000.000 realisasi capaian 99,77%.

b). Program Pengembangan UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro jumlah anggaran Rp, 60.500.000 realisasi capaian 100 %.
2. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi jumlah anggaran Rp. 35.000.000 realisasi capaian

99,71 %.

Sekretraiat

a.) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota.

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah anggaran 5.000.000 real. Capaian 100 %.
2. Evaluasi Kinerja perangkat Daerah jumlah anggran Rp. 4.000.000 Realisasi capaian 100 %.
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 4.561.849.000,00, realisasi capaian 91,37 %.
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi Pelaksanaan SKPD jumlah anggaran Rp. 75.000.000 realisasi capaian 95,23 %.
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi jumlah anggaran Rp. 7.000.000 realisasi capaian 100 %.
6. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penegrangan Bangunan kantor jumlah anggaran Rp. 5.000.000 realisasi capaian 100 %.
7. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor jumlah anggaran Rp. 56.000.000 realisasi capaian 99,05 %.
8. Penyediaan Peralatan rumah tangga jumlah anggaran 20.000.000 realisasi capaian 99,99 %.
9. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan jumlah anggaran Rp.55.500.000 realisasi capaian 100 %.
10. Fasilitas Kunjungan Tamu jumlah anggaran Rp, 17.000.000 realisasi capaian 91.68 %.
11. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD jumlah anggaran Rp. 56.490.000 realisasi capaian 98,94 %.
12. Penataan Arsip Dinamis pada SKPD jumlah anggaran Rp. 3.500.000 Realisasi capaian 100 %.
13. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik jumlah anggaran Rp. 212.400.000 realisasi capaian 84,53 %.
14. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah anggaran Rp 887.000.000 realisasi capaian 99,82 %.
15. Penyediaan jasa pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jumlah anggaran Rp. 35.000.000 realisasi capaian 98,41 %.
16. Penyediaan jasa pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan jumlah anggaran Rp. 82.358.000 realisasi capaian 90,83 %.
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya jumlah anggaran Rp. 377.200.000 realisasi anggaran 99,73 %.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Renstra adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program/kegiatan Bidang Koperasi, UKM dan Naker yang direncanakan dan dilaksanakan memenuhi target kinerja yang telah diprogramkan.

- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Penyusunan rencana kerja yang baik dalam menentukan program/kegiatan sehingga dapat dilaksanakan dan hasilnya sesuai target kinerja keluaran;
2. Indikator/sasaran kinerja dipetakan berdasarkan analisis sesuai dengan norma dan standar;
3. Pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya yang ada secara menyeluruh, efektif dan efisien.

- c. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan yaitu kurang optimalnya perencanaan pada kegiatan terkait zona integritas dalam memperhatikan ketersediaan waktu dan jumlah tenaga yang tersedia. Ketersediaan Peraturan Kepala Daerah terkait zona integritas juga belum ada, sehingga petunjuk pelaksanaan kegiatan belum jelas. Karena hal tersebut, maka pada tahun 2024 kegiatan zona integritas tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.

- d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu langkah-langkah yang diambil antara lain melakukan perubahan terhadap yang sudah ditetapkan.

- e. Perkiraan capaian target kinerja program/kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun anggaran berjalan yakni tahun 2024 adalah 94,45 %.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kab. Pekalongan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10	11=(10/4)
	NON URUSAN									
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERAKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran.	100	96,14				12 buln	100 %	20%
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100					12 bulan	100 %	20%
1	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100					12 bln	100%	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Program penunjang Urusan pemerintah daerah.	100					12 bln	100 %	20%
3	Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (SKPD)	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan	100	20	20	20	100%	12 bln	100 %	20%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian	100	20	20	20	100%	12 bln	100%	20%
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan koeprasi sehat..	100	20	20	20	100%	15 Unit	100%	20%
1	Pengawasan dan pemriksaan koperasi,KSP/USP yang wilayah Keanggotaanya dalam Kab/Kota	Persentase pengawasan koperasi sehat.	100	20	20	20	100%	15 Unit	15 unit	20%
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI YANG SEHAT	Persentase Kesehatan KSP/USP koperasi yang sehat.	100	20	20	20	100%	100 Koperasi	100 %	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	Penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Persentase KSP/USP koperasi yang sehat.	100	20	20	20	100%	100 Koperasi	100 %	20%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAAN	Persentase pengurus, pengawasan dan pengelola koperasi yang mendapat diklat.	100	20	20	20	100%	75	100%	20%
1	Pendidikan dan Pelatihan perkoperasiaan bagi wilayah yang keanggotaannya dalam Kab/Kota	Presentase pengurus, pengawas dan pengelola koperasi yang mendapatkan diklat.	100	20	20	20	100%	75	100%	20%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemberdayaan.	100	20	20	20	100 %	135 UMK	100 %	20 %
1	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan,kemudahan perijinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para	Presentase usaha mikro yang medapat fasilitasi pemberdayaan.	100	20	20	20	100 %	135 UMK	135	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10	11=(10/4)
	pemangku kepentingan.									
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Uasaha Mikro	100	20	20	20	100%	350 UMK	350 UMK	20 %
1	Pengembangan UMKM dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Presentasi usaha mikro	100	20	20	20	100%	350 UMK	350 UMK	20 %
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA.	Presentasi pencari kerja yang terdaftar yang mendapatkan pelatihan.								
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi		100	20	20	20	100%	48 Org	48 Org	20 %
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA.	Presentase Pencari Kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan kerja.						3200 Org	3200	20 %
1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	PresentasePencari Kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan kerja.	100	20	20	20	100%	3200 Org	3200 Org	20 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	Perlindungan PMI (Pra dan purna penempatan) di Daerah Kab/Kota	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan kerja	100	20	20	20	100%	5 Org	5 Org	20 %
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)						20 Perusahaan	20 Perusahaan	
1	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kab/Kota	Presentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama (PB)	100	20	20	20	100 %	20 Perusahaan	20 Perusahaan	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Calon Transmigrasi yang diberangkatkan.								
1	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Presentase Calon Transmigrasi yang diberangkatkan.	100	20	20	20	100%	1 KK	1 KK	

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINKOP UKM DAN NAKER

Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pekalongan. Pengawasan Intern tersebut meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam Draft Renstra Dinas Koperasi UKM dan Naker Tahun 2025-2029 menetapkan 5 (Lima) sasaran yang ingin dicapai dan dijabarkan dalam program sebagai berikut:

- 1) Program Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
- 2) Program Pemerintah Bidang, UKM
- 3) Program Pemerintah Pilihan.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 yang telah diusulkan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Secara umum pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Naker menunjukkan kinerja yang cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2025.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan Pengangguran Terbuka		50	50	50	50	64	3,16	75			
2	Prsentase Calon Transmigran yang di berangkatkan		20	20	20	20	40	20	0	20	40	
3	Meningkatkan Koperasi aktif		24	5.00	5,24	5,43	5,58	24	5,24			
4	Pertumbuhan Usaha Mikro		39	0,32	0,18	0,21	0,25	39	0,18			

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, UKM DAN NAKER.

Proses reformasi didalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun lalu dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Naker, yaitu:

a. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Naker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdsarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada pasal 386 Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Naker mempunyai fungsi :

1. Perumus kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, UKM dan Naker .
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Koperasi, UKM dan Naker.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, UKM dan Naker.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Naker mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan fungsi di sekretariat.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksanaan Kegiatan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pelaksanaan kegiatan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, yaitu:

- 1) Jumlah tenaga ASN dimasing-masing bidang masih belum mencukupi sesuai standar Dinas yang terdiri dari 3 Bidang, 1 UPT dan Sekretraiat.
- 2) Jumlah anggaran dalam tiap Tahun Anggaran belum mencukupi sehingga program yang terjangkau sangat terbatas belum bisa memenuhi permintaan dari masyarakat yang menginginkan kegiatan pelatihan diperbanyak.

Kondisi Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan. Lingkungan internal dikelompokkan menjadi dua yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).

Kondisi Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi yang tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan. Lingkungan eksternal dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*).

Isu-Isu strategis yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang pada Dinas Koperasi, UKM dan Naker sbb:

1. Belum optimalnya Kesempatan kerja yang didukung oleh kompetensi pekerja sesuai dengan keahliannya.
2. Belum optimalnya kesempatan kerja dari pencari kerja yang ada.
3. Rendahnya Koperasi berkualitas di Kabupaten Pekalongan.
4. Belum optimalnya peran dan partisipasi UKM Binaan dalam mendorong Perekonomian daerah.

Untuk penanganan isu-isu tersebut telah dilaksanakan Langkah-langkah sbb:

1. Memperbanyak kegiatan dibidang pelatihan yang saat ini dibutuhkan di dunia kerja yang berbasis kompetensi,
2. Membuka peluang lowongan kerja dengan perusahaan melalui Job Fair,
3. Melakukan pengawasan dan sosialisasi secara intensif ke Koperasi-Koperasi yang dikategorikan kurang sehat, koperasi yang sehat ditandai dengan RAT tiap Tahunnya,
4. Masih banyaknya para wirausaha baru yang kita latih meliputi pelatihan,

kewirausahaan baru, pemasaran/marketing, kemasan produk dan aneka macam produk.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan menyesuaikan rancangan awal RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025. Perubahan beberapa kegiatan bertujuan untuk mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan skala prioritas pembangunan tahun 2025. Selain itu perubahan program/kegiatan maupun pagu indikatif dilakukan setelah melakukan identifikasi permasalahan, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Naker berupa Pelatihan dan informasi pencari kerja baru serta pembinaan koperasi dan Balai Latihan Kerja Swasta.

Setelah melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD, membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang telah dicapai Dinas Koperasi, UKM dan Naker, serta sesuai arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD dan terbitnya aturan yang baru Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Nomenklatur program/kegiatan/Sub Kegiatan yang mengalami perubahan adalah sesuai dengan Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koeparsi UKM dan Naker

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi	100 %		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi	100 %		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	90-100% Unit Usaha	Rp. 56.000.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	90-100% Unit Usaha	Rp. 42.586.700	

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	55 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	55 %		
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota					Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha.		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	90-100% Unit Usaha	Rp. 534.200.000	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha.		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	90-100% Unit Usaha	Rp. 857.947.540	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	0,023 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	0,023 %		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui					

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	250 Unit Usaha	Rp. 659.000.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	250 Unit Usaha	Rp. 678.554.800	
	Fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	415 Unit Usaha	Rp. 36.900.000	Fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	415 Unit Usaha	Rp. 177.469.700	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	215 Unit Usaha	Rp. 510.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	215 Unit Usaha	Rp. 534.774.500	
	Koodinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	140 Orang	Rp. 192.121.343	Koodinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	140 Orang	Rp. 346.388.171	

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	55 %		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	55 %		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	385 Unit Usaha	Rp. 38.500.000	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	385 Unit Usaha	Rp. 283.555.200	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	80 Unit Usaha	Rp. 40.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	80 Unit Usaha	Rp. 131.546.950	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)			

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kerja (IKK)								
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Rp. 15.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Rp. 23.564.500	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	31 %		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	31 %		
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40,52 %				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40,52 %		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	288 Orang	Rp. 1.568.600.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	288 Orang	Rp. 1.618.600.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 Orang	Rp. 40.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 Orang	Rp. 15.540.150	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	Rp. 15.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	Rp. 10.533.080	
	Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil					Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil					
	Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	22 Perusahaan	Rp. 25.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	22 Perusahaan	Rp. 20.307.890	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	20,44 %		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	20,44 %		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					
	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	Rp. 75.000.000	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	Rp. 67.078.320	

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3500 Orang	Rp. 35.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online	3500 Orang	Rp. 25.000.000	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50 Orang	Rp. 10.000.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50 Orang	Rp. 7.458.800	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 %		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 %		
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran					

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB	10 Perusahaan	Rp. 15.000.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB	10 Perusahaan	Rp. 10.082.450	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Perusahaan	Rp. 19.350.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Perusahaan	Rp. 11.827.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan pencegahan perselisihan	8 Perkara	Rp. 20.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan pencegahan perselisihan	8 Perkara	Rp. 113.447.200	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Sidang	Rp. 15.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Sidang	Rp. 10.789.000	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	779 Orang	Rp. 170.000.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	779 Orang	Rp. 170.000.000	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	100 %		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	100 %		
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal		Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan	25 Orang	Rp. 75.000.000	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal		Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan	25 Orang	Rp. 72.977.830	

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyuluhan					Penyuluhan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp. 7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp. 5.613.160	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12 Laporan	Rp. 7.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12 Laporan	Rp. 5.321.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Rp. 4.708.471.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Rp. 4.789.846.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp. 85.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp. 83.956.880	

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Rp. 9.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Rp. 4.518.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp. 10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp. 9.994.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp. 56.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp. 53.518.840	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Rp. 30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Rp. 30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp. 75.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp. 74.648.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp. 7.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp. 5.791.440	

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp. 65.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp. 41.652.600	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp. 5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp. 3.275.520	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 168.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 186.625.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 1.105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp. 1.117.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Rp. 35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Rp. 34.995.200	

No.	DPA PERUBAHAN TAHUN 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Rp. 60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Rp. 59.997.400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Rp. 55.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Rp. 54.961.480	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Rp. 76.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Rp. 175.400.000	

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan dalam menetapkan program dan kegiatan memperhatikan usulan-usulan oleh para pemangku kepentingan sertamemperhatikan mandatori dari perundangan yang berlaku diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, dan lain-lain. Namun, karena banyaknya mandatori yang tidak dapat seluruhnya dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya, maka Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan menggunakan usulan perencanaan yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pekalongan

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kab. Pekalongan	Persentase fasilitas penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	100 %	
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Pekalongan	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	100 %	

	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pekalongan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100 Unit Usaha	
3.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Pekalongan	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota, Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Pekalongan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

III.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN NAKER

Renja Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029.

- a. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 yaitu :

“Kabupaten Pekalongan Maju, Adil, dan Sejahtera”.

- b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan.
2. Menuntaskan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan UMKM yang Berdaya Saing.
4. Memperkuat Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani.

Dalam rangka membantu Bupati Pekalongan dalam mewujudkan Visi dan Misi 3 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan UMKM yang Berdaya Saing, maka Dinas Koperasi UKM dan Naker berupaya untuk mencapai tujuan adalah “Meningkatkan kontribusi sektor PDRB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dan Meningkatkan kinerja BUMD dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran di masyarakat dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi untuk mendukung pengurangan kemiskinan”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek.

III.2. PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan rumusan program/kegiatan/subkegiatan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Program/kerja Renja Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan RKA pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 dalam mencapai target kinerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi;
- b. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebanyak 10 program terdiri dari 19 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Koperasi UKM dan Naker melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
- c. Jumlah dana/pagu indikatif untuk melaksanakan program/kegiatan Renja Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 sesuai dengan RKPD Tahun 2025 total sebesar Rp 11.967.145.801

Dalam Renja Dinas Koperasi UKM dan Naker Tahun 2025 diproyeksikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Belanja Operasional terdiri dari:

1.Belanja Kegiatan	Rp. 7.258.674.801,-
2.Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp. 4.708.471.000,-

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN

Rencana Kerja dan alokasi anggaran pada Dinas Koperasi, UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025.

Dalam Tahun 2025 Dinas Koperasi ,UKM dan Naker mendapatkan pagu anggaran Rp.11.967.145.801.

Rincian anggaran di Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Perubahan APBD
Dinas Koperasi, UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2025		Pagu Indikatif 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh koperasi	100 %	100 %		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	90-100% Unit Usaha	90-100% Unit Usaha	Rp. 56.000.000	Rp. 42.586.700
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	55 %	55 %		
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	90-100% Unit Usaha	90-100% Unit Usaha	Rp. 534.200.000	Rp. 857.947.540
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	0,023 %	0,023 %		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2025		Pagu Indikatif 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	Kepentingan					
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	Rp. 659.000.000	Rp. 678.554.800
	Fasilitas kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang memperoleh fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	415 Unit Usaha	415 Unit Usaha	Rp. 36.900.000	Rp. 177.469.700
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	215 Unit Usaha	215 Unit Usaha	Rp. 510.000.000	Rp. 534.774.500
	Koodinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	140 Orang	140 Orang	Rp. 192.121.343	Rp. 346.388.171
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	55 %	55 %		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil					
	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	385 Unit Usaha	385 Unit Usaha	Rp. 38.500.000	Rp. 283.555.200
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	Rp. 40.000.000	Rp. 131.546.950
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	100 %		
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (IKK)				
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp. 15.000.000	Rp. 23.564.500
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	31 %	31 %		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40,52 %	40,52 %		
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	288 Orang	288 Orang	Rp. 1.568.600.000	Rp. 1.618.600.000

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2025		Pagu Indikatif 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 Orang	160 Orang	Rp. 40.000.000	Rp. 15.540.150
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga	30 Lembaga	Rp. 15.000.000	Rp. 10.533.080
	Konsultasi Produktifitas Pada Perusahaan Kecil					
	Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	22 Perusahaan	22 Perusahaan	Rp. 25.000.000	Rp. 20.307.890
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (IKK)	20,44 %	20,44 %		
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang	300 Orang	Rp. 75.000.000	Rp. 67.078.320
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3500 Orang	3500 Orang	Rp. 35.000.000	Rp. 25.000.000
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50 Orang	50 Orang	Rp. 10.000.000	Rp. 7.458.800
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 %	100 %		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %	100 %		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2025		Pagu Indikatif 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan pembuatan dan pengesahan PP serta pendaftaran PKB	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Rp. 15.000.000	Rp. 10.082.450
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Rp. 19.350.000	Rp. 11.827.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan dan pencegahan perselisihan	8 Perkara	8 Perkara	Rp. 20.000.000	Rp. 113.447.200
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Sidang	3 Sidang	Rp. 15.000.000	Rp. 10.789.000
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	779 Orang	779 Orang	Rp. 170.000.000	Rp. 170.000.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi terdaftar yang mendapatkan pembinaan	100 %	100 %		
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	25 Orang	25 Orang	Rp. 75.000.000	Rp. 72.977.830
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2025		Pagu Indikatif 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp. 7.000.000	Rp. 5.613.160
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 7.000.000	Rp. 5.321.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	Rp. 4.708.471.000	Rp. 4.789.846.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp. 85.000.000	Rp. 83.956.880
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	Rp. 9.000.000	Rp. 4.518.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp. 10.000.000	Rp. 9.994.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp. 56.000.000	Rp. 53.518.840
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp. 75.000.000	Rp. 74.648.800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 7.000.000	Rp. 5.791.440
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 65.000.000	Rp. 41.652.600
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp. 5.000.000	Rp. 3.275.520
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 168.000.000	Rp. 186.625.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 1.105.000.000	Rp. 1.117.000.000

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendapatan			
			Target 2025		Pagu Indikatif 2025	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
		Disediakan				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	Rp. 35.000.000	Rp. 34.995.200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	Rp. 60.000.000	Rp. 59.997.400
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	Rp. 55.000.000	Rp. 54.961.480
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	Rp. 76.000.000	Rp. 175.400.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Naker serta berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Naker, menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2025.

Untuk melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Naker karena akan sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, diharapkan Rencana Kerja ini bukanlah hanya sebagai dokumen administrasi saja, namun dilaksanakan secara substansial yang merupakan cerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan dalam pencapaian visi dan misi Pimpinan Daerah.

Disamping itu Renja Dinas Koperasi UKM dan Naker juga memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Naker ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Pekalongan Tahun 2025-2029 serta memberikan manfaat bagi proses pembangunan di Kabupaten Pekaiongan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Dinas Koperasi UKM dan Naker Tahun 2025 disusun terukur dengan berpedoman pada arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 dan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Naker Tahun 2025-2029.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Koperasi UKM dan Naker atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Unsur teknis pelaksana kerja pada Dinas Koperasi UKM dan Naker, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang

telah ditetapkan.

4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Kajen, 1 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Dinkop UKM dan Naker
Kabupaten Pekalongan



WIDODO, S.H., M.A.
Pembina Tk. I
NIP : 19690208 1994 1 006